

BAB I

PENDAHULUAN

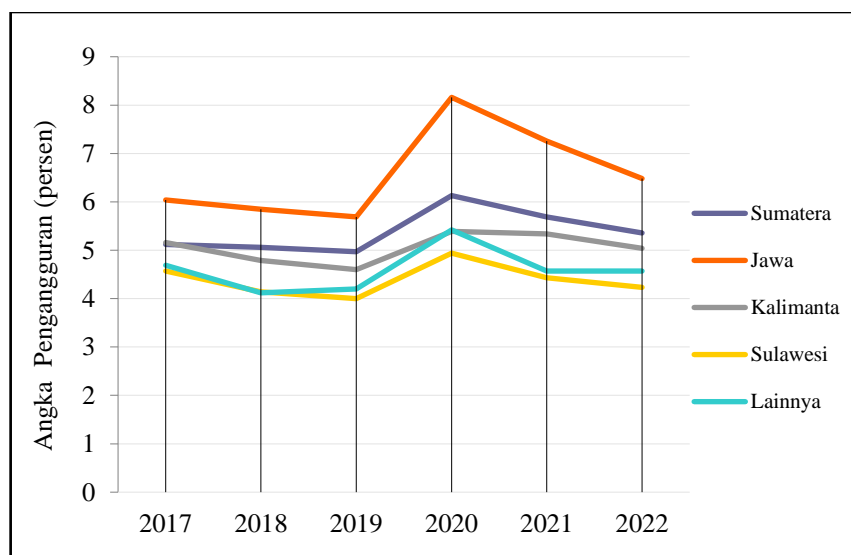
1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari pembangunan daerah, sebab daerah Indonesia terdiri atas provinsi-provinsi, kabupaten atau kota dan daerah-daerah yang lebih kecil. Ketenagakerjaan merupakan aspek penting yang memainkan peran dalam keberhasilan ekonomi. Sektor ekonomi akan terus berubah sepanjang proses pembangunan. Begitupula dengan jumlah penduduk yang bekerja pada sektor ekonomi akan terus berubah. Hal ini tidak lepas dari pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) dan penyerapan tenaga kerja. Pembangunan SDM pun tidak dapat tercapai tanpa adanya pemberdayaan terhadap tenaga kerja.

Tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi yang mempengaruhi pendapatan nasional. Tanpa adanya tenaga kerja, faktor produksi alam serta faktor produksi modal tidak bisa digunakan secara maksimal. Teori Neo Klasik berpendapat bahwa penawaran tenaga kerja selalu sama dengan permintaan tenaga kerja, dengan asumsi semua pihak mempunyai informasi yang lengkap mengenai pasar tenaga kerja. Keadaan dimana penawaran tenaga kerja sama dengan permintaan tenaga kerja disebut titik ekuilibrium. Jika penawaran tenaga kerja sama dengan permintaan tenaga kerja, maka tidak akan terjadi pengangguran. Kenyataannya, titik keseimbangan tidak pernah tercapai karena informasi tidak pernah sempurna dan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran tenaga kerja (David Romer, 2012)

Indonesia adalah salah satu negara berkembang di dunia yang memiliki masalah dalam hal ketenagakerjaan. Persoalan ketenagakerjaan yang sebenarnya bukan sekedar kuantitas tenaga kerja saja, namun persoalan yang sebenarnya adalah bagaimana perekonomian dapat memberikan kesempatan kerja yang berkualitas, mampu memberikan harapan dan optimisme bagi tenaga kerja yang terserap dan bekerja di sektor tersebut. Terbatasnya permintaan tenaga kerja dan berkurangnya lapangan kerja akan menyebabkan meningkatnya pengangguran dan mengurangi tenaga kerja (Zahroh et al., 2021).

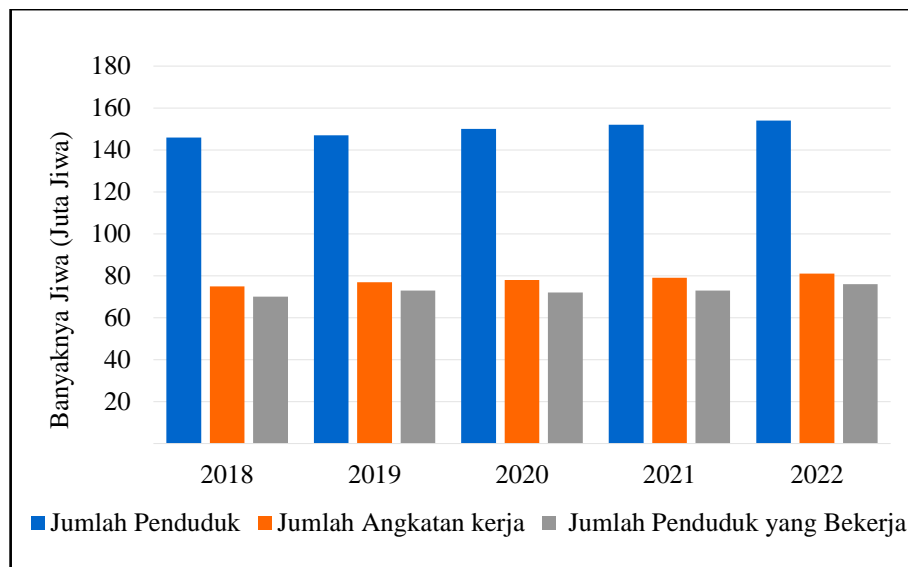
Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS), diketahui bahwa tingkat pengangguran di Pulau Jawa lebih tinggi dibanding dengan pulau-pulau lain di Indonesia. Berikut merupakan data tingkat pengangguran terbuka di Indonesia tahun 2017-2022.



Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

Gambar 1.1 Rata-rata Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Indonesia Tahun 2017-2022 (Persen)

Gambar 1.1 menunjukkan bahwa rata-rata TPT Pulau Jawa berada pada peringkat tertinggi yaitu sebesar 6,48% pada tahun 2022 dibandingkan pulau-pulau lain di Indonesia. Kondisi ini terjadi karena Pulau Jawa merupakan pusat pembangunan nasional dan pusat kegiatan ekonomi, sehingga banyak kegiatan urbanisasi dimana masyarakat berbondong-bondong datang ke Pulau Jawa untuk mencari pekerjaan. Masyarakat yang datang ke Pulau Jawa berpikir bahwa di Pulau Jawa banyak tersedia lapangan pekerjaan. Berikut merupakan data jumlah penduduk, jumlah angkatan kerja, dan jumlah tenaga kerja di Indonesia tahun 2018-2022.



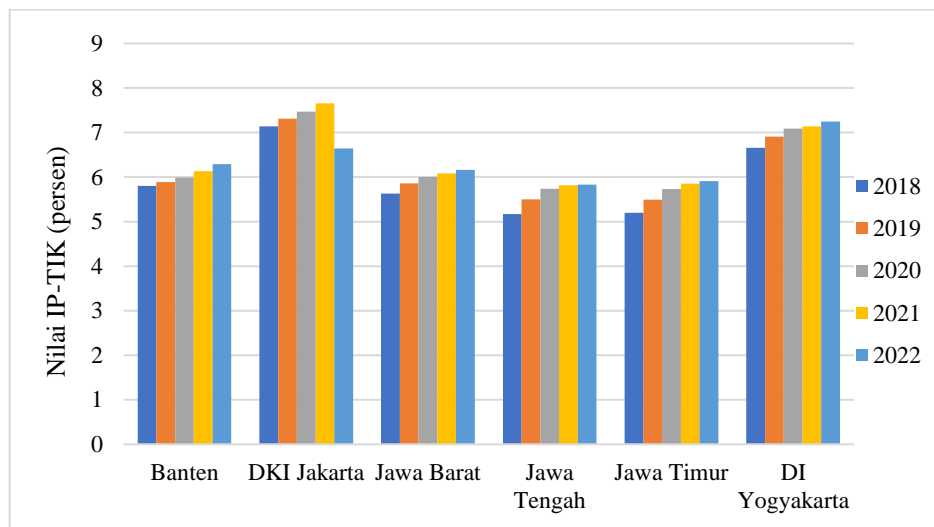
Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

Gambar 1.2 Perkembangan Jumlah Penduduk, Jumlah Angkatan Kerja, dan Jumlah Penduduk yang Bekerja di Pulau Jawa Tahun 2018-2022 (Juta Jiwa)

Berdasarkan BPS dapat diketahui bahwa jumlah penduduk di Pulau Jawa pada tahun 2022 sebesar 154 juta jiwa atau setara dengan 56,10 % dari total jumlah penduduk di Indonesia. Ini berarti hampir setengah penduduk Indonesia berada di

Pulau Jawa. Jumlah penduduk di Pulau Jawa mengalami peningkatan setiap tahunnya. Meningkatnya jumlah penduduk secara otomatis akan meningkatkan jumlah angkatan kerja di Pulau Jawa. Meskipun jumlah angkatan kerja terus mengalami peningkatan, tetapi jumlah tersebut belum bisa menyeimbangi tingginya pertumbuhan jumlah tenaga kerja yang terserap setiap tahunnya. Pertambahan jumlah angkatan kerja ini harus diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja yang sesuai dengan keinginan dan peluang mereka sehingga penyerapan tenaga kerja akan lebih optimal.

Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja adalah perkembangan teknologi. Saat ini, hampir semua aktivitas manusia tidak lepas dari penggunaan teknologi digital, seperti penggunaan internet oleh individu maupun kelompok yang meliputi proses jual beli barang dan jasa secara *online* (*e-commerce*), proses administrasi, dan penggunaan jasa transportasi juga kerap dilakukan secara *online*. Hal ini menjadi acuan bagi para tenaga kerja untuk mengikuti perkembangan teknologi dengan terus mengasah dan meningkatkan keterampilan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahmadani dan Idris (2020) menyatakan bahwa pembangunan teknologi berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja. Artinya ketika pembangunan teknologi meningkat maka penyerapan tenaga kerja akan meningkat. Berikut merupakan data perkembangan teknologi di Pulau Jawa tahun 2018-2022.

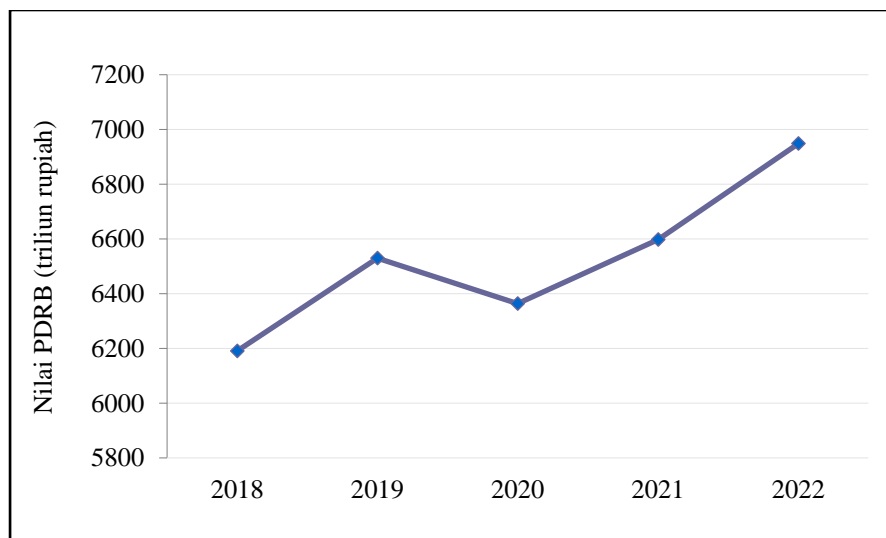


Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

Gambar 1.3 Perkembangan Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) Setiap Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2018-2022 (Persen)

Berdasarkan gambar 1.3, perkembangan Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) setiap provinsi di Pulau Jawa cenderung meningkat dari tahun ke tahunnya kecuali di DKI Jakarta yaitu sempat mengalami penurunan pada tahun 2017, namun kembali meningkat pada tahun-tahun selanjutnya. DKI Jakarta termasuk provinsi dengan tingkat IP-TIK tertinggi di Pulau Jawa, itu berarti bahwa DKI Jakarta didorong oleh pencapaian tiga sub-indeks pembangunan TIK yaitu sub-indeks akses dan manufaktur, sub-indeks penggunaan, dan sub-indeks keahlian yang terbilang cukup baik. Kemudian tingkat IP-TIK terendah ditempati oleh Provinsi Jawa Tengah, hal ini karena Provinsi Jawa Tengah merupakan wilayah yang rata-rata masyarakatnya masih konvensional atau kental dengan adat istiadat (BPS, 2020).

Faktor kedua adalah pertumbuhan ekonomi yang juga berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja. Pertumbuhan ekonomi daerah diukur dengan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berdasarkan harga konstan. PDRB dapat mempengaruhi jumlah tenaga kerja dengan asumsi jika PDRB meningkat maka jumlah nilai output di suatu daerah akan meningkat. Semakin besar output atau penjualan yang dilakukan oleh perusahaan, maka akan mendorong perusahaan untuk menambah jumlah tenaganya agar dapat mengimbangi peningkatan penjualan yang terjadi. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Zaid (2022) menyatakan bahwa PDRB berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja. Artinya ketika PDRB meningkat maka penyerapan tenaga kerja juga meningkat. Berikut merupakan data PDRB di Pulau Jawa tahun 2018-2022.



Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

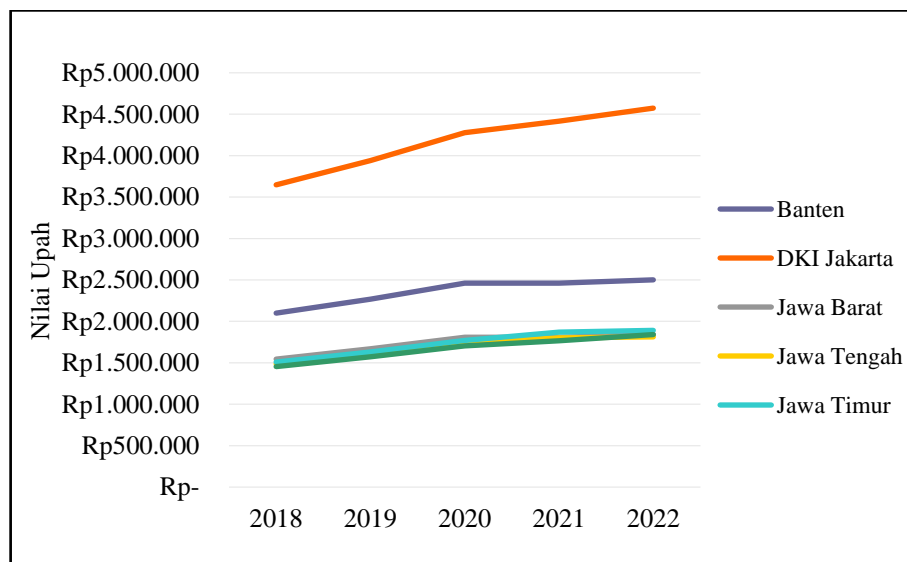
**Gambar 1.4 PDRB Atas Dasar Harga Konstan di Pulau Jawa
Tahun 2018-2022 (Triliun Rupiah)**

Pulau Jawa merupakan penyumbang output terbesar dibandingkan dengan pulau lain, setengah dari total PDB Indonesia berasal dari Pulau Jawa. Berdasarkan gambar 1.4 dapat dilihat bahwa PDRB di Pulau Jawa cenderung mengalami peningkatan dari setiap tahunnya. Namun pada tahun 2020 mengalami penurunan yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19. Pertumbuhan tersebut menandakan bahwa barang dan jasa yang dihasilkan juga meningkat, jika produksi meningkat maka akan membutuhkan tenaga kerja yang banyak, sehingga banyak angkatan kerja yang terserap.

Indikator lain yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja yaitu tingkat upah. Upah memiliki pengaruh negatif terhadap penyerapan tenaga kerja. Hal ini terjadi karena jika suatu perusahaan menaikkan upah akan berdampak terhadap biaya produksi barang dan jasa juga naik. Sehingga perusahaan menaikkan harga barang dan jasa tersebut tetapi hal ini justru menurunkan permintaan barang sehingga mengharuskan perusahaan mengurangi produksi mereka.

Kondisi tersebut sesuai dengan yang dikemukakan oleh Kuncoro (2002) bahwa peningkatnya tingkat upah akan memberi dampak pada turunnya jumlah permintaan tenaga kerja. Kenaikan upah akan mengakibatkan penurunan kuantitas tenaga kerja yang diminta. Apabila tingkat upah naik sedangkan harga input lain tetap, berarti harga tenaga kerja relatif lebih mahal dari input lain. Sehingga perusahaan terdorong untuk mengurangi penggunaan tenaga kerja yang relatif mahal dengan input lain yang harganya relatif lebih murah guna mempertahankan keuntungan yang maksimum. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rohman (2021) menyatakan bahwa penanaman upah berpengaruh negatif terhadap penyerapan

tenaga kerja. Artinya ketika upah meningkat maka penyerapan tenaga kerja akan menurun. Berikut merupakan data upah minimum provinsi di Pulau Jawa tahun 2018-2022.



Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

Gambar 1.6 Upah Minimum Provinsi (UMP) Pulau Jawa Tahun 2018-2022

Peningkatan upah minimum tidak selalu dibarengi dengan adanya peningkatan penyerapan tenaga kerja (Febrianti dan Juliannisa, 2021). Hal ini terbukti pada gambar 1.6 bahwa UMP di Provinsi DI Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten setiap tahunnya mengalami peningkatan, sedangkan jumlah tenaga kerja pada tahun 2018 sampai 2022 mengalami fluktuasi. DKI Jakarta memiliki tingkat upah minimum yang tinggi dibandingkan dengan Provinsi lainnya, sementara itu Provinsi DI Yogyakarta memiliki upah minimum terendah.

Berdasarkan hasil dari penelitian terdahulu serta uraian fenomena dan permasalahan di atas bahwa terdapat perbedaan hasil dan ketidaksesuaian antara

pandangan teori pada penelitian-penelitian sebelumnya yang menggambarkan bahwa IP-TIK, PDRB, dan UMP dapat berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja. Peneliti tertarik untuk meneliti pengaruh IP-TIK, PDRB, dan UMP terhadap penyerapan tenaga kerja di Pulau Jawa, karena Pulau Jawa saat ini merupakan pulau dengan angka pengangguran tertinggi di Indonesia yang disebabkan oleh tidak seimbangnya antara angkatan kerja dengan kesempatan kerja yang sesuai dan berkualitas. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu menggunakan data sekunder dengan jenis penelitian kuantitatif, sedangkan perbedaannya terletak pada waktu penelitian dan penggunaan variabel Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) dalam memengaruhi penyerapan tenaga kerja dengan menggunakan metode analisis yang digunakan yaitu analisis regresi data panel. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Determinan Penyerapan Tenaga Kerja di Pulau Jawa Tahun 2012-2022”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Adapun rumusan masalah yang didapat dari latar belakang penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan Upah Minimum Provinsi (UMP) secara parsial terhadap penyerapan tenaga kerja di Pulau Jawa tahun 2012-2022?
2. Bagaimana pengaruh Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan Upah

Minimum Provinsi (UMP) secara bersama-sama terhadap penyerapan tenaga kerja di Pulau Jawa tahun 2012-2022.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan Upah Minimum Provinsi (UMP) secara parsial terhadap penyerapan tenaga kerja di Pulau Jawa tahun 2012-2022.
2. Untuk mengetahui pengaruh Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan Upah Minimum Provinsi (UMP) secara bersama-sama terhadap penyerapan tenaga kerja di Pulau Jawa tahun 2012-2022.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini memberikan kesempatan bagi penulis untuk menyelaraskan ilmu yang telah diperoleh selama proses perkuliahan, dan untuk melengkapi salah satu syarat akademik dalam rangka memperoleh gelar sarjana dalam bidang ilmu ekonomi pada Universitas Siliwangi.

2. Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur dan referensi bagi lingkungan *civitas academica* khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Siliwangi.

3. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan bahan masukan bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan terkait untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja, khususnya bagi pemerintah daerah Pulau Jawa.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan literatur dan referensi dalam menyusun penelitian selanjutnya yang relevan.

1.5 Lokasi dan Jadwal Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah enam provinsi di Pulau Jawa meliputi Provinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DI Yogyakarta. Dalam hal ini penulis menggunakan data sekunder yang diperoleh dari *website* resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Banten, BPS DKI Jakarta, BPS Jawa Barat, BPS Jawa Tengah, BPS Jawa Timur, BPS DI Yogyakarta, dan Open Data Jabar.

1.5.2 Jadwal Penelitian

Penelitian ini dimulai sejak bulan September 2023 dengan pengajuan judul kepada pihak Program Studi Ekonomi Pembangunan. Adapun rencana kegiatan penelitian ditampilkan sebagai berikut:

